



**Judul** : Pemerintah pusat perlu turun tangan  
**Tanggal** : Rabu, 19 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## 2 | Politik & Hukum

KOMPAS, RABU, 19 JANUARI 2022

### ANGGARAN DAERAH

## Pemerintah Pusat Perlu Turun Tangan

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah pusat diharapkan turun tangan untuk mengatasi persoalan terlambatnya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu caranya adalah dengan mempertemukan pemerintah daerah dan DPRD karena keterlambatan pengesahan RAPBD disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai pedoman penyusunan dan penetapan anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data Kemendagri, hingga Selasa (18/1/2022), lebih dari 100 pemerintah daerah belum mengesahkan RAPBD tahun 2022. Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD yang hampir setiap tahun terjadi menyebabkan lambannya penyerapan anggaran.

Salah satu sebab RAPBD terlambat disahkan adalah adanya perbedaan persepsi antara DPRD dan pemda mengenai pedoman penyusunan penetapan anggaran. Lukman mengatakan, polemik muncul karena kurangnya sosialisasi petunjuk teknis penyusunan anggaran yang dikeluarkan Kemendagri. "Setiap tahun ganti-ganti terus Permendagri. Kemendagri yang lambat sehingga di daerah menunggu," ujarnya.

Keterlambatan pengesahan RAPBD mengakibatkan proyek pembangunan tak bisa dilaksanakan dengan cepat sehingga merugikan masyarakat. Selain itu, gaji pegawai dan DPRD juga terlambat diberikan.

Oleh karena itu, menurut Lukman, persoalan tersebut mesti segera diperbaiki. Pemerintah pusat diminta untuk memfasilitasi pertemuan antara pemda dan DPRD guna mendapatkan titik temu. "Seharusnya pemerintah pusat melihat persoalan di daerah dan memanggil pemda serta DPRD daerah tersebut demi mendapatkan jalan keluarnya," kata Lukman.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan, Kemendagri telah mengeluarkan pedoman penyusunan APBD tahunan tepat waktu. Dengan demikian pemda tinggal mengikuti pedoman tersebut.

Tarik-menarik kepentingan antara pemda dan DPRD dalam pembahasan APBD adalah hal yang lumrah di negara demokrasi. "Namun, semua harus dalam koridor perencanaan, prioritas, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Kastorius.

Hampir seluruh provinsi telah menetapkan APBD tepat waktu, paling lambat 31 Desember 2021. Hanya APBD DKI Jakarta yang baru disahkan pada 13 Januari karena adanya perbedaan tanggapan terhadap hasil evaluasi dari Kemendagri. Adapun untuk pengesahan APBD di tingkat kabupaten/kota masih dalam proses pemantauan.

### Komitmen politik

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman mengatakan, dalam penyusunan APBD, pemda harus fokus pada program-program prioritas. Hal yang tak kalah penting, pemda dan DPRD mesti memiliki komitmen politik yang sama.

Selain itu, Kemendagri juga semestinya mengambil langkah tegas terhadap pemda yang melewati batas akhir pengesahan APBD. Dengan pemberian insentif dan disinsentif, maka daerah akan terpacu untuk mengikuti aturan.

Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengharapkan pemda mempercepat realisasi penggunaan anggaran setelah APBD disahkan. Percepatan realisasi terutama dilakukan untuk anggaran kesehatan, termasuk pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19. (PDS)